

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017 Bupati Kabupaten Bantul kepada DPRD ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kepala daerah wajib menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah salah satu wujud konkrit dari hubungan antar susunan pemerintahan. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun kedua RPJMD Tahun 2016-2021. Tema pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah “memantapkan pemberdayaan ekonomi daerah untuk peningkatan mutu kesejahteraan rakyat dan memperteguh nilai luhur budaya dengan semangat pancasila”. Tema pembangunan ini sekaligus juga sebagai tema LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017.

A. DASAR HUKUM

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bantul ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

- juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentang alam Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04'50"-27°50'50" Lintang Selatan dan 110°10'41"-110°34'40" Bujur Timur. Kabupaten Bantul berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat, dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km², terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan. Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km², sementara Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km². Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan dua desa dan 43 pedukuhan.

Berdasarkan kondisi lahan terdapat luas lahan 50.685 Ha yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, kebun campur, hutan, tandus, tambak, dan

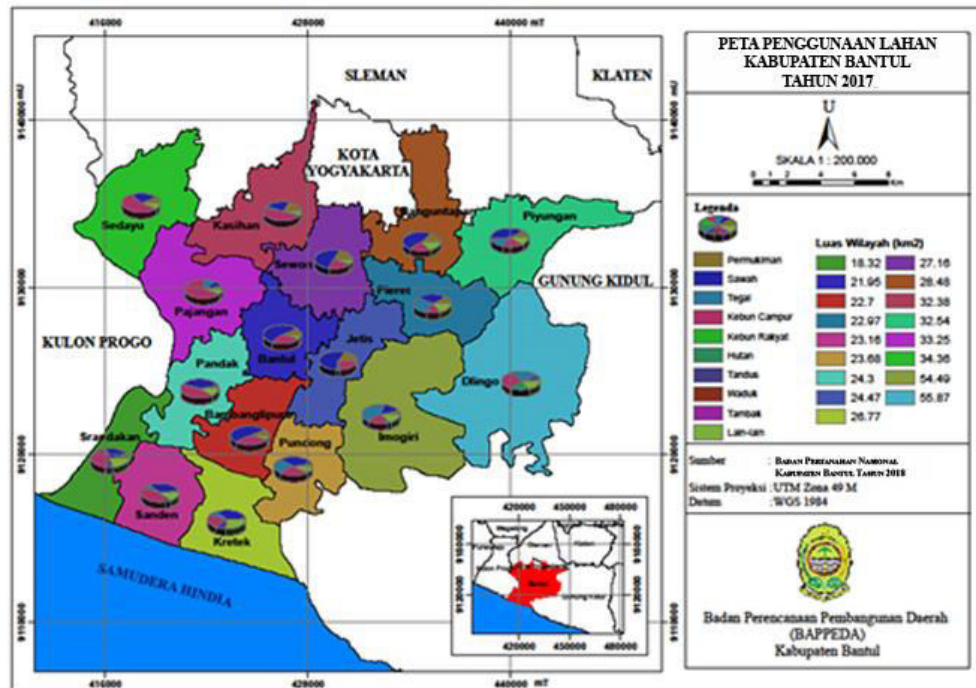
lain-lain (Tabel 1.1). Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul (Peta 1.1). Di dalam Tabel 1.1 ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar 33,42% dan sawah sebesar 31%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,05%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur terbesar ada di Kecamatan Pajangan yaitu seluas 2.287,049 Ha. Adapun persawahan terluas terdapat di Kecamatan Sewon dengan luas 1.376,594 Ha. Sementara itu, pemanfaatan tambak hanya berada di wilayah Kecamatan Srandakan seluas 30 Ha.

Data pada Tabel 1.1 didasarkan pada data legal formal yang ada di BPN. Pada kenyataannya ada pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan data formal yang ada di BPN, misalnya lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk rumah pribadi, tegalan yang dimanfaatkan sebagai tambak perorangan, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan langkah-langkah khusus untuk menahan laju alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan zonasi pemanfaatannya.

Tabel 1.1
Penggunaan Lahan Tahun 2017 (Ha)

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)										Total
		Kampung	Sawah	Tegal	Kebun Campur	Kebun Rakyat	Hutan	Tanah Tandus	Waduk	Tambak	Lainnya	
1.	Srandakan	77,12	478,16	26,89	694,00	0,00	26,12	99,00	0,00	30,00	400,72	1.832,00
2.	Sanden	57,13	828,39	92,69	896,00	0,00	30,31	119,00	0,00	0,00	292,49	2.316,00
3.	Kretek	41,77	943,73	209,34	469,42	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	710,75	2.677,00
4.	Pundong	89,41	866,41	455,98	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,71	2.368,00
5.	Bambanglipuro	186,44	1152,06	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	2.270,00
6.	Pandak	98,21	973,90	44,00	1.061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,43	2.430,00
7.	Bantul	190,20	1195,72	2,00	684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,24	2.195,00
8.	Jetis	422,13	1367,77	104,52	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	2.447,00
9.	Imogiri	240,30	913,33	2.127,98	1.347,80	0,00	24,90	23,00	0,00	0,00	771,69	5.449,00
10.	Dlingo	114,69	258,31	1.705,43	1.681,25	0,00	976,73	0,00	0,00	0,00	850,58	5.587,00
11.	Pleret	239,83	707,34	572,05	355,99	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	359,06	2.297,00
12.	Piyungan	357,34	1297,41	535,64	716,24	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	331,96	3.254,00
13.	Banguntapan	446,83	1296,10	6,53	653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,01	2.848,00
14.	Sewon	505,65	1376,59	1,95	642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70	2.716,00
15.	Kasihan	575,48	824,34	105,58	1.563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,06	3.238,00
16.	Pajangan	125,59	272,73	424,73	2.287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	3.325,00
17.	Sedayu	293,45	960,99	68,71	1.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	3.436,00
	JUMLAH	4.061,55	15.713,27	6.484,01	16.943,81	0,00	1.136,19	543,00	0,00	30,00	5.773,16	50.685,00
	Persentase (%)	8,01	31,00	12,79	33,42	0,00	2,24	1,07	0,00	0,05	11,39	100,00

Sumber: BPN Kabupaten Bantul, 2018



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Peta 1.1
Penggunaan Lahan

2. Kondisi Umum Daerah

- Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak 928.676 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 927.181 jiwa (Tabel 1.2), terdiri dari laki-laki sebanyak 462.449 jiwa dan perempuan sebanyak 464.732 jiwa. Penurunan jumlah penduduk ini mayoritas karena terjadinya mutasi penduduk keluar;
- Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 528.161 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 558.980 jiwa.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 2,99% atau 15.309 jiwa dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1,95% atau 10.324 jiwa. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 3,12% atau 17.440 jiwa;

- Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 14,07%, mengalami penurunan sebesar 0,47% dibanding tahun 2016 yang mencapai 14,54%.
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2016 sebesar 78,42, di mana angka ini lebih tinggi dari DIY (78,38) dan nasional (70,18).

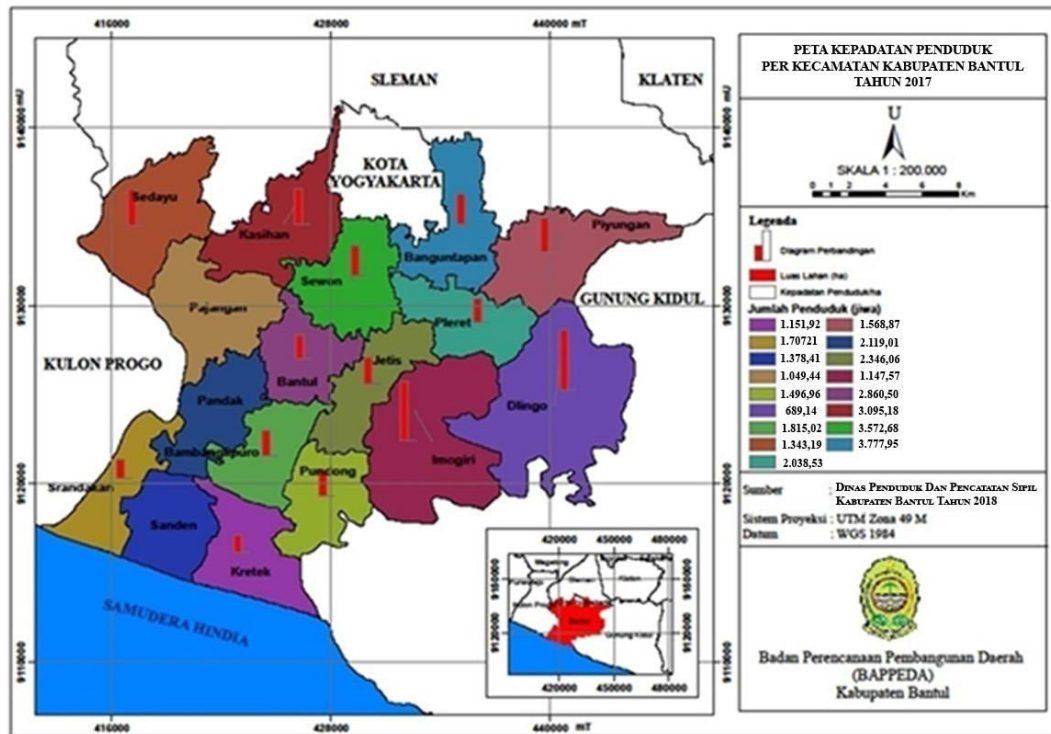
3. Kepadatan Penduduk Geografis

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah (Tabel 1.2 dan Peta 1.2).

Tabel 1.2
Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1	Srandakan	18,32	31.276	1.707,21
2	Sanden	23,16	31.924	1.378,41
3	Kretek	26,77	30.837	1.151,92
4	Pundong	23,68	35.448	1.496,96
5	Bambanglipuro	22,70	41.201	1.815,02
6	Pandak	24,30	51.492	2.119,01
7	Bantul	21,95	62.788	2.860,50
8	Jetis	24,47	57.408	2.346,06
9	Imogiri	54,49	62.531	1.147,57
10	Dlingo	55,87	38.502	689,14
11	Pleret	22,97	46.825	2.038,53
12	Piyungan	32,54	51.051	1.568,87
13	Banguntapan	28,48	107.596	3.777,95
14	Sewon	27,16	97.034	3.572,68
15	Kasih	32,38	100.222	3.095,18
16	Pajangan	33,25	34.894	1.049,44
17	Sedayu	34,36	46.152	1.343,19
JUMLAH		506,85	927.181	1.829,30

Sumber: Disdukcapil dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (Data diolah)
Data: semester 2



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Peta 1.2
Kepadatan Penduduk Geografis

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa penyebaran penduduk geografis Kabupaten Bantul tahun 2017 tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah yang berbatasan dengan kota Yogyakarta antara lain Kecamatan Banguntapan (3.777,95 jiwa/km²), Sewon (3.572,68 jiwa/km²), dan Kasihan (3.095,18 jiwa/km²). Sementara itu, kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (689,14 jiwa/km²). Rata-rata kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah sebesar 1.950,45 jiwa/km².

4. Kepadatan Penduduk Agraris

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu diketahui

agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Peta 1.3.

Tabel 1.3
Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan
Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	Luas Areal		Jumlah Penduduk		Kepadatan/Ha	
		Pertanian 2016 (Ha)	Pertanian 2017 (Ha)	2016 (Jiwa)	2017 (Jiwa)	(2016)	(2017)
1	Srandakan	1.225,16	1.225,16	31.244	31.276	25,50	25,53
2	Sanden	1.847,52	1.847,39	32.494	31.924	17,59	17,28
3	Kretek	1.623,02	1.622,48	31.082	30.837	19,15	19,01
4	Pundong	2.056,11	2.055,89	35.484	35.448	17,26	17,24
5	Bambanglipuro	1.971,28	1.971,06	41.385	41.201	20,99	20,90
6	Pandak	2.079,79	2.079,36	51.770	51.492	24,89	24,76
7	Bantul	1.891,55	1.882,57	63.124	62.788	33,37	33,35
8	Jetis	1.985,72	1.985,29	57.474	57.408	28,94	28,92
9	Imogiri	4.414,27	4.414,01	62.419	62.531	14,14	14,17
10	Dlingo	4.621,72	4.621,72	38.666	38.502	8,37	8,33
11	Pleret	1.699,44	1.698,11	46.663	46.825	27,46	27,57
12	Piyungan	2.571,99	2.564,70	50.846	51.051	19,77	19,91
13	Banguntapan	1.966,02	1.956,16	107.548	107.596	54,70	55,00
14	Sewon	2.027,57	2.020,65	97.420	97.034	48,05	48,02
15	Kasihan	2.506,89	2.493,46	100.330	100.222	40,02	40,19
16	Pajangan	2.987,62	2.984,51	34.674	34.894	11,61	11,69
17	Sedayu	2.862,34	2.854,76	46.053	46.152	16,09	16,17
Jumlah/Rata-rata		40.338,01	40.277,28	928.676	927.181	427,90	428,05

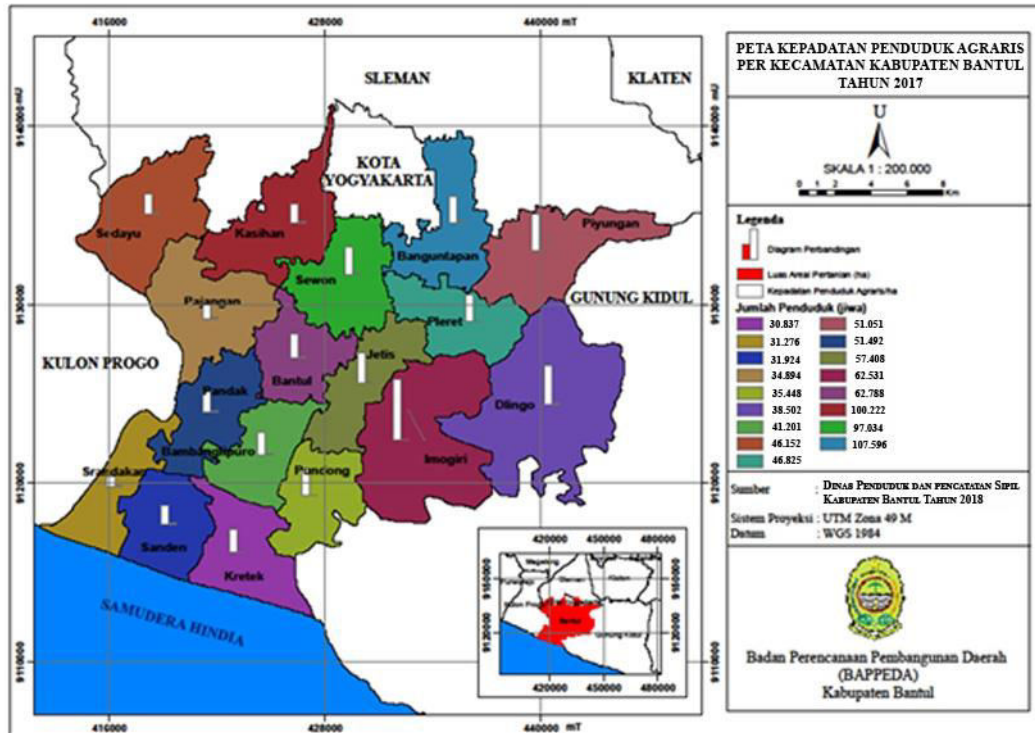
Sumber: Dari berbagai sumber (diolah), 2018

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data kepadatan penduduk agraris Kabupaten Bantul, diketahui bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Melalui data kepadatan penduduk agraris Kabupaten Bantul selama tahun 2016-2017 dijelaskan bahwa dalam kurun 1 tahun terjadi penyusutan luas pertanian di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul seluas 60,73 Ha. Penyusutan luas lahan yang terbesar, terletak pada Kecamatan Kasihan dengan total penyusutan sebesar 13,43 Ha. Adapun penyusutan luas lahan pertanian terendah terletak pada Kecamatan Sanden dengan total penyusutan sebesar 0,13 Ha. Kemudian, penyusutan lahan pertanian tidak terjadi pada Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Dlingo pada tahun 2017.

Dengan melihat kecenderungan terjadinya penyusutan lahan pertanian setiap tahunnya maka perlu ada upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju penyusutannya. Penyusutan lahan pertanian hanya dibenarkan apabila dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas maupun kepentingan lainnya sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa penyebaran penduduk agraris tidak merata. Berdasarkan data penduduk agraris Kabupaten Bantul tahun 2016, daerah yang memiliki kepadatan penduduk agraris tertinggi di wilayah Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Banguntapan dengan kepadatan penduduk sebesar 54,70 jiwa/Ha, kemudian selanjutnya Kecamatan Sewon dengan kepadatan penduduk sebesar 48,05 jiwa/Ha, dan Kecamatan Kasihan dengan kepadatan penduduk sebesar 40,02 jiwa/Ha. Selain itu, kepadatan penduduk agraris terendah di wilayah Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo dengan kepadatan penduduk agraris sebesar 8,37 jiwa/Ha.

Sementara itu, berdasarkan data jumlah penduduk agraris Kabupaten Bantul tahun 2017, daerah yang memiliki kepadatan penduduk agraris tertinggi di wilayah Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Banguntapan dengan kepadatan penduduk sebesar 55,00 jiwa/Ha, kemudian setelah itu disusul oleh Kecamatan Sewon dengan kepadatan penduduk sebesar 48,02 jiwa/Ha, dan Kecamatan Kasihan dengan kepadatan penduduk sebesar 40,19 jiwa/Ha. Selain itu, kepadatan penduduk agraris terendah di Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo dengan kepadatan penduduk agraris sebesar 8,33 jiwa/Ha.



Sumber: Dari berbagai sumber (diolah), 2018

Peta 1.3
Kepadatan Penduduk Agraris

5. Sebaran Penduduk Menurut Umur

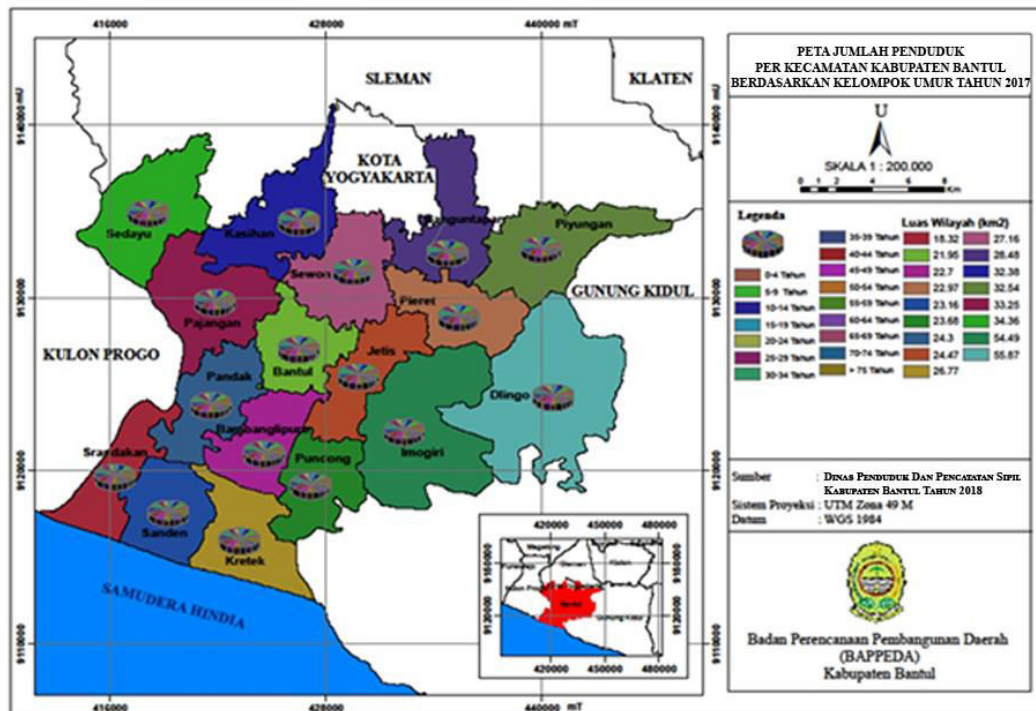
Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka dapat diterapkan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut (lihat Tabel 1.4 dan Peta 1.4).

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Per Kecamatan
Tahun 2017

No.	Kecamatan	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75	Jumlah
1	Srandakan	1.884	2.226	2.163	2.077	2.150	2.144	2.214	2.296	2.121	2.280	2.214	2.012	1.584	1.150	861	1.900	31.276
2	Sanden	1.783	2.223	1.966	2.159	2.303	2.051	2.041	2.317	2.169	2.417	2.217	1.993	1.638	1.234	1.135	2.278	31.924
3	Kretek	1.788	2.077	2.021	2.124	2.143	1.979	1.979	2.150	2.163	2.251	2.216	2.009	1.549	1.240	1.047	2.101	30.837
4	Pundong	2.189	2.537	2.281	2.456	2.465	2.541	2.558	2.597	2.378	2.545	2.476	2.349	1.773	1.229	1.056	2.018	35.448
5	Bambanglipuro	2.482	2.917	2.830	2.797	2.652	2.737	2.950	2.959	2.880	3.069	3.092	2.820	1.896	1.479	1.188	2.453	41.201
6	Pandak	3.059	3.696	3.510	3.634	3.482	3.587	3.792	3.941	3.614	3.803	3.701	3.459	2.492	1.616	1.233	2.873	51.492
7	Bantul	3.875	4.669	4.611	4.343	4.169	4.252	4.699	4.785	4.395	4.801	4.715	4.212	3.065	1.900	1.337	2.960	62.788
8	Jetis	3.627	4.315	4.117	3.913	3.778	4.056	4.301	4.538	4.231	4.168	4.032	3.775	2.628	1.727	1.310	2.892	57.408
9	Imogiri	4.178	4.756	4.320	4.056	4.199	4.350	4.847	5.068	4.371	4.284	4.058	3.924	3.083	2.175	1.602	3.260	62.531
10	Dlingo	2.304	2.739	2.609	2.789	2.883	2.778	2.569	2.714	2.889	3.000	2.483	2.361	1.883	1.531	1.087	1.883	38.502
11	Pleret	3.264	3.993	3.721	3.364	3.327	3.274	3.494	3.916	3.811	3.471	2.838	2.487	1.849	1.290	947	1.779	46.825
12	Piyungan	3.372	4.142	3.846	3.877	3.482	3.481	3.946	4.219	3.836	3.818	3.286	2.883	2.213	1.458	1.081	2.111	51.051
13	Banguntapan	7.248	8.827	8.406	7.845	7.653	7.680	8.270	9.250	8.307	8.251	7.088	6.348	4.613	2.809	1.931	3.070	107.596
14	Sewon	6.230	7.351	7.104	7.027	6.613	6.814	7.332	8.110	7.188	7.443	6.842	6.131	4.534	2.777	1.883	3.655	97.034
15	Kasih	6.507	7.841	7.562	7.247	6.999	7.148	7.867	8.662	7.619	7.449	6.816	6.082	4.421	2.880	1.897	3.225	100.222
16	Pajangan	2.246	2.768	2.470	2.672	2.539	2.411	2.662	2.881	2.497	2.548	2.220	2.022	1.529	1.065	709	1.655	34.894
17	Sedayu	2.884	3.480	3.427	3.330	3.259	3.206	3.225	3.691	3.330	3.427	3.198	2.782	2.222	1.381	1.135	2.175	46.152
Jumlah		58.920	70.557	66.964	65.710	64.096	64.489	68.746	74.094	67.799	69.025	63.492	57.649	42.972	28.941	21.439	42.288	927.181
Persentase		6,35%	7,61%	7,22%	7,09%	6,91%	6,96%	7,41%	7,99%	7,31%	7,44%	6,85%	6,22%	4,63%	3,12%	2,31%	4,56%	100%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2018

Data: Semester 2



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Peta 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan proporsi umur penduduk. Jumlah penduduk terbesar Kabupaten Bantul pada tahun 2017 adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun) sebesar 68,82% dan penduduk pada kelompok usia muda (0-14 tahun) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 21,19%. Sementara proporsi terendah adalah kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 9,99%. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) dan jumlah penduduk tua (65 tahun ke atas) disebut jumlah penduduk non-produktif. Dengan demikian dapat dihitung rasio ketergantungan penduduk Bantul tahun 2017 yaitu sebesar 45,31%.

Berdasarkan tabel tersebut dalam perencanaan pembangunan, untuk kelompok usia muda agar lebih diperhatikan dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar. Sementara kelompok umur produktif yang proporsinya juga cukup besar, kebijakan ekonomi seperti perluasan lapangan kerja dan

pelatihan keterampilan menjadi lebih dominan. Sementara itu penduduk usia lanjut (64 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil. Meskipun demikian lima tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional. Hal ini perlu diantisipasi dari sekarang sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia, serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

6. Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

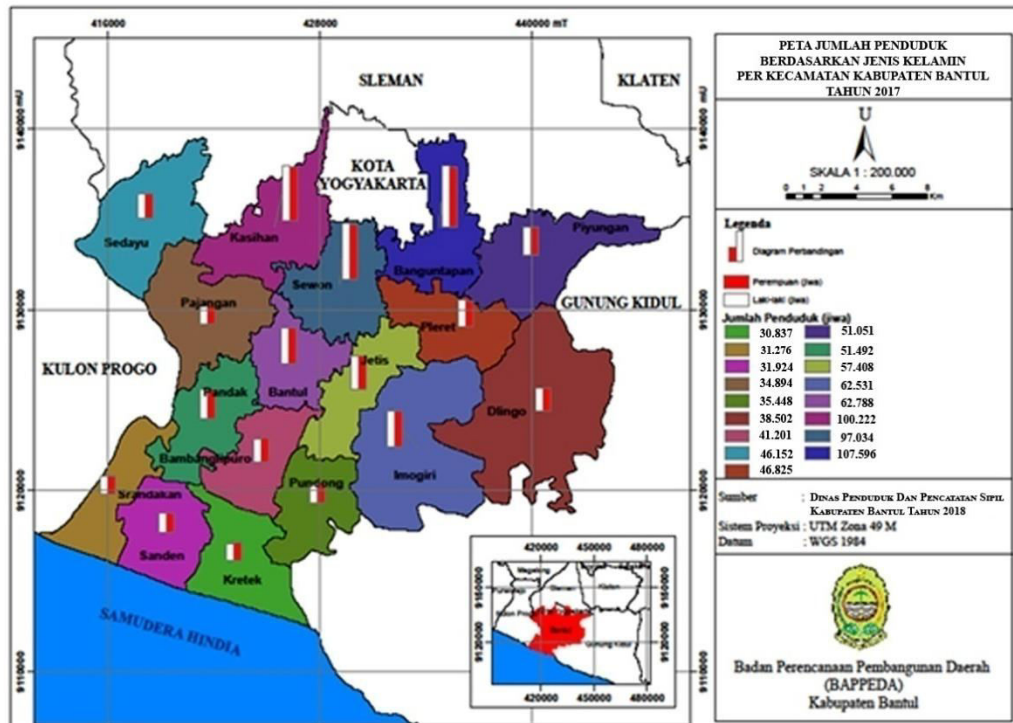
Guna melakukan kebijakan yang berprespektif *gender* maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin (Tabel 1.5 dan Peta 1.5). Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat disimpulkan bahwa penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bantul tidak merata. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 53.786 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 50.152 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 48.760 jiwa. Demikian juga halnya, jumlah penduduk perempuan yang terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul masih pada tiga kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 53.810 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 50.070 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 48.274 jiwa. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki terendah adalah Kecamatan Kretek sebanyak 15.061 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terendah adalah Kecamatan Srandakan sebanyak 15.725 jiwa.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	15.551	15.725	31.276
2	Sanden	15.755	16.169	31.924
3	Kretek	15.061	15.776	30.837
4	Pundong	17.456	17.992	35.448
5	Bambanglipuro	20.326	20.875	41.201
6	Pandak	25.820	25.672	51.492
7	Bantul	31.230	31.558	62.788
8	Jetis	28.540	28.868	57.408
9	Imogiri	31.168	31.363	62.531
10	Dlingo	19.188	19.314	38.502
11	Pleret	23.590	23.235	46.825
12	Piyungan	25.490	25.561	51.051
13	Banguntapan	53.786	53.810	107.596
14	Sewon	48.760	48.274	97.034
15	Kasih	50.152	50.070	100.222
16	Pajangan	17.467	17.427	34.894
17	Sedayu	23.109	23.043	46.152
	Jumlah	462.449	464.732	927.181

Sumber: Disdukcapil, Januari 2018 Data : Semester 2



Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Peta 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

7. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan *System of National Account* (SNA) tahun 2008, pada tahun 2017 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 menggantikan tahun dasar 2000. Dengan dasar perhitungan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 (angka sangat sementara) sebesar 4,52% atau mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2016 yang mampu tumbuh sebesar 5,06%.

Hal ini disebabkan oleh melambatnya beberapa kegiatan sektor ekonomi, utamanya kegiatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan produksi pada tanaman bahan makanan yang meliputi padi dan palawija. Perlambatan yang dialami pada sektor pertanian, lebih disebabkan oleh cuaca terutama intensitas hujan yang meningkat diakhir tahun, sehingga pertanian mengalami gagal panen karena banjir. Sektor industri pengolahan mengalami perlambatan pada kegiatan industri mikro dan kecil, hal ini disebabkan peningkatan produksi tidak setinggi tahun sebelumnya.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 (sangat sementara) mencapai angka 22,816 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan 1,655 triliun rupiah dibanding tahun 2016 yang mencapai 21,161 triliun rupiah. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi dan laju inflasi yang terkendali.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2017 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 17,117 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 4,34% dibanding tahun 2016 yang mencapai 16,405 triliun rupiah. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Sumber utama pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di Kabupaten Bantul terutama didukung oleh kinerja pada sektor *real estate*;

penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; administrasi pemerintahan; dan jasa lainnya yang mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2016.

Pada tahun 2017, kontribusi PDRB Kabupaten Bantul didominasi oleh tiga sektor ekonomi, yaitu: sektor industri pengolahan sebesar 15,21% (lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 15,17%); sektor pertanian sebesar 12,55% (menurun dari tahun sebelumnya sebesar 14,39%); dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,72% (lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 11,67%) (angka sementara). Sementara keempat belas sektor lainnya hanya mampu menyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Bantul kurang dari sepuluh persen dan secara keseluruhan, ketiga sektor dominan tersebut di atas menyumbang PDRB sebesar 39,48%.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dari sisi transformasi struktural pada tiga sektor tidak mengalami perubahan. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalan. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) *real estate*; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (11) jasa lainnya. Peran sektor primer terus mengalami pergeseran digantikan oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 13,16% lebih kecil dibandingkan dengan *share* sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 25% dan sektor tersier sebesar 61,84% (lihat Grafik 1.1).



Sumber: BPS, 2018

Grafik 1.1
Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2013-2017

Berdasarkan Grafik 1.1 terlihat bahwa sektor primer mengalami penurunan kontribusi dari 16% pada tahun 2013 menjadi 13,16% pada tahun 2017. Sektor sekunder mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu besar, dari 24,99% pada tahun 2013 menjadi 25,00% pada tahun 2017. Sementara sektor tersier sebagai sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Bantul, meningkat dari 58,99% pada tahun 2013 menjadi 61,84% pada tahun 2017.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rentang lima tahun pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya pada sektor tersier. Penurunan peran sektor primer bisa diimbangi dengan peningkatan sektor sekunder dan tersier.

8. Inovasi Daerah

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah, masyarakat, swasta, dan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama mengembangkan kreativitas dan inovasi serta lebih memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Inovasi sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi *mindset* semua elemen, sedangkan Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga Litbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat, dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah sistem inovasi daerah yang saling terkait dan berkelanjutan.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Bappeda telah melaksanakan implementasi *Roadmap* SIDa tahun pertama. *Roadmap* SIDa tahun pertama diarahkan untuk (1) pengembangan pewarna alami batik tulis pada kelompok pengrajin batik Harjo Manunggal di Dusun Tirto, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak; dan (2) sosialisasi desa inovasi di 17 kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melibatkan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam mengawali pengembangan indigofera sebagai tanaman pewarna batik alami, dan memberi pendampingan berupa *workshop* terkait (a) budidaya tanaman pewarna alami batik (tanaman indigofera) dan (b) proses pembuatan pasta pewarna batik hingga proses pewarnaan batik menggunakan pasta indigofera.

Selain Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul menjalin kerjasama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian RI. Kerja sama ini tentang pengembangan industri dan kerajinan batik di Kabupaten Bantul dengan ruang lingkup penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik, penerapan hasil penelitian dan pengembangan dan rekayasa teknologi, pengembangan desain produk kerajinan dan batik, pelatihan teknis, penyediaan instruktur dan tenaga ahli, pemberian informasi dan layanan konsultasi, supervisi untuk mengembangkan IKM kerajinan dan batik di Kabupaten Bantul.

Kementerian Desa saat ini sedang giat membentuk Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di tingkat kecamatan dan Kementerian Ristek Dikti telah mencanangkan 1000 desa inovasi di tahun 2014. Di Kabupaten Bantul telah dibentuk Posyantek di 13 kecamatan yaitu: Bantul, Srandakan, Sanden, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Imogiri, Dlingo, Pleret, Banguntapan, Sewon, Kasihan, dan Sedayu. Selain itu, telah dilakukan kegiatan sosialisasi desa inovasi dan inovasi desa di 17 kecamatan.

Keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Kerjasama yaitu:

- 1) Tema: peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Bantul melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - a) Universitas Gadjah Mada

- b) Universitas Pertamina
 - c) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - d) Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta
 - e) Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
 - f) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta
 - g) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta
 - h) Poltekkes Kemenkes Surabaya
 - i) Akademi Kebidanan Ummi Kasanah
 - j) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
 - k) Universitas Alma Ata
 - l) STIKES Akademi Kebidanan Yogyakarta
- 2) Tema: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Bantul
- a) Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti
 - b) Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta
- 3) Tema: Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya masyarakat di Kabupaten Bantul
- a) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta
 - b) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta
 - c) Universitas Islam Indonesia
 - d) Universitas Jenderal Soedirman
 - e) Akademi Kebidanan Ummi Khasanah
 - f) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
 - g) Universitas Alma Ata
 - h) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo
- 4) Tema: Peningkatan penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) dan HIV
- a) Daerah 'Aisiyah Kabupaten Bantul
- 5) Tema: Pengembangan wilayah pesisir melalui optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) berbasis teknologi di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul
- a) Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) Yogyakarta

- 6) Tema: Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan Kabupaten Bantul
 - a) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
- 7) Tema: Penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul
 - a) STMIK AKAKOM Yogyakarta
 - b) Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
 - c) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta
 - d) Universitas Alma Ata
 - e) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo
- 8) Tema: Penyelenggaraan pendidikan tugas belajar program pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bantul
 - a) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)
 - b) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM)
- 9) Tema: Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bidang Kesehatan Kabupaten Bantul
 - a) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM)
- 10) Tema: Pengembangan sistem surveilan gizi kesehatan ibu dan anak sebagai landasan untuk membangun gerakan perbaikan seribu (1.000) hari pertama kehidupan di Kabupaten Bantul
 - a) Universitas Alma Ata
- 11) Tema: Penelitian penggunaan *Wolbachia* untuk Eliminasi *Dengue*
 - a) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM)

Pengabdian kepada masyarakat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat antara lain: a) mendapatkan bantuan pemikiran dan tenaga dalam pemecahan masalah pembangunan daerah/lokasi, b) dikenalkannya pola pikir dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan berbagai program pembangunan, khususnya di pedesaan, c) tumbuhnya dorongan potensi dan inovasi di kalangan anggota masyarakat setempat dalam upaya pemenuhan kebutuhan lewat pemanfaatan ilmu dan pengetahuan. Terkait pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi

(bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul (Tabel 1.6).

Tabel 1.6
Jumlah Penelitian/Survey dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2017

No.	Uraian	2016	2017
1	Penelitian/Validitas/Survey oleh:		
	- Perguruan Tinggi	4.381	3.463
	- Lembaga Survey	142	39
2	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:		
	- Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL)	258	281
	Jumlah	4.781	3.783

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah penelitian/survey dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 998 izin dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan kewenangan SMA/SMK ke DIY, sehingga pengurusan izin untuk level pendidikan tersebut beralih ke DIY.

Sebagai payung hukum pelaksanaan perizinan penelitian KKN dan PKL pada tahun 2017 ini diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perizinan Penelitian KKN dan PKL dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/Bappeda/2017 tentang Prosedur Pelayanan Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good governance*), inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul berorientasi pada layanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan. Perbaikan layanan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik antara lain berupa pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pelayanan publik di bidang non-kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencantumkan secara transparan

syarat, biaya, dan prosedur layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Beberapa inovasi pelayanan publik adalah:

a. Pelayanan publik di bidang non kesehatan:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa (a) Inovasi Situpat (Siji Entuk Papat) yang merupakan inovasi pelayanan kependudukan yang dilakukan dengan satu kali permohonan data kependudukan untuk bayi yang baru lahir namun mendapatkan empat dokumen sekaligus yaitu NIK, akta kelahiran, KK, KIA (Kartu Identitas Anak); (b) Inovasi Kaperu (KTP baru bagi pengantin baru) yang merupakan hasil sinkronisasi data dan integrasi Sistem Informasi Nikah (Simkah) pada Kantor Kemenag dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan inovasi BISS (*Bantul Integrated Siren System*) atau diseminasi peringatan dini tsunami berupa teknologi penyebaran peringatan dan arahan kepada masyarakat di daerah rawan tsunami.
- Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPPKP) melakukan inovasi Insab (Irigasi Kabut Bantul), yaitu sistem penyiraman tanaman dengan menggunakan air yang dipompa ke dalam pipa yang telah diberi titik-titik lubang kecil-kecil, dan inovasi Siperkasa (Sistem Penjemuran Karya Santosa) merupakan inovasi yang memungkinkan petani dapat mengeringkan gabah hasil panennya dalam kondisi cuaca hujan berupa sistem pengeringan gabah dengan menggunakan tenda.
- PDAM Bantul melakukan inovasi Siap Prima (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Pengaduan, Rekening, Informasi lain melalui Android) yang merupakan inovasi pelayanan publik

yang dimaksudkan untuk memudahkan seluruh pelanggan PDAM dalam mengakses semua informasi yang dibutuhkan terkait pelayanan.

- Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) melakukan inovasi Sapa ASN (Sistem Aplikasi Terpadu ASN) yang merupakan pelayanan berupa aplikasi yang menangani proses administrasi data kepegawaian terpadu.
- Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian (DKUKMP) melakukan inovasi Kampung UKM Digital, yang merupakan program pemberdayaan masyarakat UMKM melalui upaya mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Kecamatan Sanden melakukan inovasi Den Smardi (*Sanden Smart District*) yang merupakan pengembangan kecamatan yang menciptakan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup dengan memiliki keunggulan di berbagai bidang, peningkatan penggunaan IT, pemetaan potensi kecamatan.
- Kecamatan Piyungan melakukan inovasi penerbitan IUMK Jemput Bola. IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) merupakan tanda legalitas kepada pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar izin usaha mikro dan kecil. Kecamatan Piyungan melakukan jemput bola kepada usaha mikro dan kecil untuk pengurusan IUMKnya, misalnya di pasar dan di sentra industri mikro dan kecil.
- Kecamatan Bantul melakukan inovasi Getarr (Gerakan Tanggap Renovasi Rumah) yang merupakan program inovasi yang bertujuan untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni bagi penduduk tidak mampu dengan metode gotong-royong masyarakat dan pembiayaan bukan anggaran pemerintah yaitu dari CSR, donatur, dan infak sodaqoh.

b. Pelayanan di bidang kesehatan berupa:

- Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melakukan inovasi Sepekan yang merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sekolah peduli kasus anemia.
- RSUD Panembahan Senopati melakukan gerakan inovasi Paparasi (Pendaftaran Rawat Jalan dengan Zonasi).
- Beberapa gerakan yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas yaitu di Puskesmas Kasihan I melakukan inovasi: (a) Kekep Ibu (Kelas Kelompok Pendukung Ibu) yang merupakan pertemuan rutin tiap satu bulan sekali untuk memantau perkembangan ibu hamil hingga memasuki masa persalinan, termasuk pemenuhan gizi bayi di 1000 hari pertamanya; (b) Wakol Buharis (Perawatan Kolaborasi Ibu Hamil beresiko tinggi); (c) Dokter Lubis (dokter cilik luar biasa) yang merupakan dokter cilik di lingkungan sekolah yang diberi pelatihan untuk melaksanakan fungsi medis awal terhadap permasalahan kesehatan yang ringan di lingkungannya; (d) *Quick Service/ Quick Areal* yang merupakan pelayanan cepat pendaftaran pasien di Puskesmas mendahului jam kerja, yakni mulai jam 6 pagi.
- Puskesmas Kasihan II melakukan inovasi Syberhatra Jampi Setaman yang merupakan program kesehatan tradisional yang terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan, meliputi tiga hal yaitu pembinaan terhadap penyehat tradisional, pemberdayaan masyarakat dengan asuhan mandiri serta pelayanan di Puskesmas dengan didukung keterpaduan lintas program dan lintas sektor.
- Puskesmas Sewon II melakukan inovasi Fresh (Forum Remaja Sehat) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap remaja tentang kesehatan reproduksi, sehingga dapat mencegah terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD).

- Puskesmas Pleret melakukan inovasi: (a) Main Kar Free Day yang merupakan pelayanan saat imunisasi Balita pada hari Rabu yang mana pada hari tersebut diberlakukan area khusus bagi Balita yang akan diimunisasi untuk bebas bermain dan *klekaran* sehingga tercipta lingkungan sehat yang aman, nyaman, menyenangkan, dan edukatif; (b) inovasi Kripek Paru yang merupakan program yang bertujuan untuk mengubah stigma masyarakat tentang penyakit TBC dan upaya untuk penanggulangan penyakit TBC.
- Puskesmas Bantul I melakukan: (a) inovasi stimulasi auditori dan pemenuhan nutrisi pengungkit otak ditujukan untuk ibu hamil dengan tujuan untuk melatih kemampuan auditor anak sejak dini (dalam kandungan); (b) inovasi Dus Saji (Dusun Sehat Jiwa) merupakan inovasi untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan diberi pelatihan keterampilan berupa membuat tas, hiasan dinding, dan barang lainnya dari kertas koran.
- Puskesmas Bantul II melakukan inovasi Adik-Re (Asuhan Dini Kesehatan Reproduksi) yang merupakan sosialisasi yang terkait dengan pembekalan mengenai kesehatan reproduksi kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya anak-anak sekaligus sebagai upaya agar anak terhindar dari bahaya pelecehan seksual.
- Puskesmas Sanden melakukan inovasi Tabur Giziku Bersama merupakan inovasi untuk penanganan gizi buruk bagi Balita. Dalam inovasi ini, upaya yang dilakukan adalah (1) meningkatkan cakupan pemberian PMT-P bagi balita KEP dan (2) meningkatkan cakupan pemberian PMT-P bagi Bumil KEK (Kekurangan Energi Kronis).
- Puskesmas Srandakan melakukan inovasi Celan Gumbregah yang merupakan inovasi pos pelayanan kesehatan remaja.

Remaja dilibatkan untuk memonitor kesehatan diri dan lingkungannya terutama pada kasus anemia.

- Puskesmas Jetis I melakukan inovasi Geliat Barongan yang merupakan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dusun Barongan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 11 program inovasi, di antaranya Sehat Lansia Welas Asih dan Tengok dan Temani Simbah (Selasih dan Tetebah), Taman Hidup Upaya Suka Sayur (Tahu Susur), dan Warung Hidup Obat Keluarga (Wah OK).
- Puskesmas Bambanglipuro melakukan inovasi Paguyuban Tresno Rogo yang merupakan suatu wadah (kelas) bagi pasien diabetes mellitus dan hipertensi khususnya yang rutin kontrol di Puskesmas agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang apa itu penyakit yang diderita serta meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari komplikasi akibat penyakit.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut juga *e-government (e-gov)* dan *online government* dan telah berjalan di Kabupaten Bantul. *E-government* telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan aplikasi *e-gov* melalui *website*, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 66 sistem informasi dan 51 aplikasi baik yang bersifat *intranet*, *desktop*, maupun *online* (Tabel 1.7).

Tabel 1.7
Aplikasi Sistem Informasi Tahun 2001-2017

No.	Tahun	Nama aplikasi
1	2001	SIM Pengolahan Gaji PNS
2	2002	SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan)
3	2003-2004	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
4	2005	SIM Monografi <i>Online</i>
5	2005	SIM Kependudukan
6	2006	SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006)
7	2007	Sistem Cetak KK dan KTP
8	2007	Sistem Keluarga Berencana
9	2007	Sistem Tenaga Kerja dan Nakertrans
10	2007	Sistem Informasi Pariwisata
11	2007	Sistem Informasi Layanan Data KPDE
12	2007	Sistem informasi Presensi PNS
13	2008	SIM Keluarga Miskin
14	2008	SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC
15	2008	SIM Potensi Kecamatan
16	2008	SIM Pelayanan Perpustakaan
17	2009	SIM Keuangan Daerah
18	2009	SIM Barang Daerah
19	2009	SIM Investasi Daerah
20	2009	SIM Kepegawaian
21	2009	SIM Pengendalian Pembangunan Daerah
22	2009	SIM Pelayanan Pajak Reklame
23	2009	SIM Pelayanan BPHTB
24	2010	SIM Perijinan <i>Online</i>
25	2010	SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
26	2011	SIM Kewilayahan
27	2012	SIM Penanggulangan Kemiskinan
28	2012	SIM Perencanaan Pembangunan
29	2012	Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
30	2012	Pengembangan Sistem Perijinan On-line
31	2012	Sistem Informasi Pedagang Pasar
32	2012	Sistem Informasi Barang Milik Daerah
33	2012	Sistem Informasi PBB
34	2013	Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul
35	2013	Interoperabilitas Sistem Keuangan Kabupaten Bantul
36	2014	Interoperabilitas SIM Pernikahan dan SIAK
37	2014	SIM Pelaporan Kesehatan Masyarakat
38	2014	eSakip (SIM Laporan Kinerja)
39	2015	SIM Kesiswaan
40	2015	SIM Aplikasi Database Tanah Desa
41	2015	SIM Database Jaminan Kesehatan
42	2015	SIM Polisi Pamong Praja
43	2015	SIM Aset PNPM (Database Aset PNPM dan Dana Bergulir)
44	2016	SIM Interoperabilitas SID dan SIM PATEN Kecamatan
45	2016	Sistem Aplikasi Perencanaan pembangunan berbasis desa
46	2017	SIM elapor
47	2017	SIM simbarang-nakertrans
48	2017	SIM simbarang-setwan
49	2017	Sistem pendaftaran online kendaraan
50	2017	SIM Wistlerblower
51	2017	SIM Zona Integritas
52	2017	SIM simbarangdlh
53	2017	SIM smscenter
54	2017	SIM tanahdesa
55	2017	SIM tanahkasultanan
56	2017	Sistem Informasi Desa (75 Desa)

No.	Tahun	Nama aplikasi
57	2017	SIM Aset
58	2017	SIM Menara Telekomunikasi
59	2017	SIM rsudps
60	2017	SIM Perencanaan Pembangunan
61	2017	SIM Integrasi Data Kependudukan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
62	2017	SIM Penanggulangan Kemiskinan
63	2017	SIM Pengendalian Pembangunan
64	2017	SIM Monografi desa
65	2017	SIM Pelaporan Administrasi Kesehatan Masyarakat
66	2017	SIM Perizinan
67	2017	Aplikasi Pengembangan Sekolah Adiwiyata
68	2017	Aplikasi agenda kegiatan DPRD
69	2017	Aplikasi dppkbpm
70	2017	Aplikasi dprd
71	2017	Aplikasi dwp
72	2017	Aplikasi jdih-dprd
73	2017	Aplikasi Jejaring Pengelola Sampah Mandiri AMOR
74	2017	Aplikasi jrd
75	2017	Aplikasi kesiswaan
76	2017	Aplikasi layananinspektorat
77	2017	Aplikasi paten
78	2017	Aplikasi pbb
79	2017	Aplikasi perizinan-bappeda
80	2017	Aplikasi persuratan-bappeda
81	2017	Aplikasi perundanganri
82	2017	Aplikasi pkk
83	2017	Aplikasi pnpm-pmd
84	2017	Aplikasi potensiwisata
85	2017	Aplikasi ppid
86	2017	Aplikasi ppkd
87	2017	Aplikasi ppns
88	2017	Aplikasi profildkp
89	2017	Aplikasi profilkoperasi
90	2017	Aplikasi puskesmas-pleret
91	2017	Aplikasi rkas
92	2017	Aplikasi sarpras-sd
93	2017	Aplikasi setda
94	2017	Aplikasi sik
95	2017	Aplikasi simpamong
96	2017	Aplikasi simpangindagkop
97	2017	Aplikasi simpegnaker
98	2017	Aplikasi simpel
99	2017	Aplikasi sinak
100	2017	Aplikasi sipleret
101	2017	Aplikasi siukm
102	2017	Aplikasi ulp-pbj
103	2017	Aplikasi umum
104	2017	Aplikasi warintek
105	2017	Aplikasi pencaker
106	2017	Aplikasi simperkes
107	2017	Aplikasi mpm
108	2017	Aplikasi pbd
109	2017	Aplikasi dpmp
110	2017	Aplikasi e-investment
111	2017	Aplikasi lkpm-dpmp
112	2017	Aplikasi Kearsipan
113	2017	Aplikasi SPSE
114	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu
115	2017	Aplikasi Pelayanan Terpadu

No.	Tahun	Nama aplikasi
116	2017	Aplikasi Pengadaan Barang Secara Elektronik
117	2017	Aplikasi Sistem Pengelolaan Presensi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, 2018

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa mulai tahun 2016 bisa diakses melalui <http://eproc.jogjakarta.go.id>.

Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, di antaranya melalui:

- a. Pemanfaatan media telematika, seperti: SMS Center, email dan informasi melalui *website* daerah (www.bantulkab.go.id), subdomain tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), dan *Teleconference* (rapat komprehensif dan rapat Muspida);
- b. Pemanfaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu Projomansari) serta dialog interaktif di Radio Persatuan, RRI dan Bantul FM;
- c. Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin serta beberapa *leaflet* program-kegiatan dari setiap SKPD.

Tabel 1.8
Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

No.	Media	2017
1	SMS Center	Januari sd Desember: 252 SMS
2	Siaran Taman Gabusan TVRI Yogyakarta	36x siaran di studio dan 4x siaran di luar studio
3	Website daerah (www.bantulkab.go.id)	54 sub domain dengan 275.022 pengunjung
4	Dialog Interaktif Radio Bantul FM	24 siaran
5	Jurnal Riset Daerah	Penerbitan 3 edisi reguler (bulan April, Agustus, dan Desember) dan Edisi Khusus tahun 2017 bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018 (data diolah)

Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan penerapan Iptek cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan sentuhan inovasi dan Iptek. Industri kreatif yang berkembang di masyarakat berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni pertunjukan, desain produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni Gabusan), hingga berkembang sampai pengembangan bersama kawasan GMT (Gabusan, Manding, Tembi) dan Kawasan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi).

Peran teknologi tepat guna sangat besar dalam mendukung berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimal. Beberapa teknologi tepat guna yang telah dipublikasikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 terlihat pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9
Teknologi Tepat Guna dan Penemu Tahun 2017

No.	Teknologi Tepat Guna	Penemu
1	Inovasi Wedang Uwuh yang memiliki khasiat untuk Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus	- Septian Emma Dwi Jatmika - Kintoko, Khoiriyah Isnri
2	Diversifikasi Desain dan Peningkatan Kualitas Produk Gerabah Panjangrejo Pundong Bantul dengan Teknik <i>Modern Fishing</i>	- Arif Suharson - Indro Baskoro Miko Putro
3	Implementasi Teknologi Konstruksi Sistem Rumah Tangga Tahan gempa pada Bantuan Stimulan Bahan Baku Bangunan Ancaman Bencana Tanah Longsor	- Dwi Wantoro - Ardy
4	Sinkronisasi Sistem Kemalir dan Pengairan Berselang dalam Upaya Pengendalian Gulma dan Hama Keong Emas pada Berbagai Macam Penanaman untuk Optimalisasi Produktivitas Padi Sawah	Nur Fatimah Suharso
5	Sentuhan Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan Produksi Tusuk Sate	Sumantri Sri Nugroho
6	Alat Putar Dekoratif Otomatis Dengan System Elektronik Guna Mendukung Produksi dalam Industry Gerabah	Aji Setiawan
7	Inovasi Bahan Ajar <i>AudioTactical</i> Materi Bangun Datar Guna Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Tunanetra	Janu Arlinwibowo
8	Pemanfaatan Beras Merah Lokal (<i>Oryza Nivara</i>) dan Ubi Jalar Orange Lokal (<i>Ipomoea Batatas L</i>) dalam Pembuatan Produk Inovasi Olahan Nutriflakes (<i>Cereal Local Red Rice and Local Sweet Potato</i>) Minuman Cepat Saji Sebagai Solusi Sarapan Instan	Nur Fatimah
9	Tas Mantel 2 in 1	- Tri Kusuma Astuti, S.Pd - Triyanto, S.Pd

No.	Teknologi Tepat Guna	Penemu
10	Nasi Goreng Aneka Buah (<i>Fred Rice Fruits</i>)	- Triyanto, - Sudaryanto
11	Batago (Batako Lego): Solusi Pencegahan Kerusakan Berat Akibat Gempa Bumi	SMA N 1 Bantul (Alfian Nur Rahman)
12	Inovasi Pengolahan Wedang Uwuh Menjadi Dodol Uwuh	SMA N 1 Jetis (Liana Febriyanti dan Ganesha Nawang Sari)
13	Pemanfaatan Getah Pisang Sebagai Bahan Baku Tinta Sablon Ramah Lingkungan	SMA N 1 Jetis (Galih Aji Kuncoro Jati dan Rizza Utami Putri)
14	Alat Jemur Padi Non Mesin (AJADINOSIN)	SMA N 1 Jetis (Rahmah Sakinah)
15	Potensi Bunga Kluwih (<i>Artocarpus Altilis</i>) Sebagai Pengusir Nyamuk dengan Dibuat Formula Lotion yang Ramah terhadap Lingkungan	SMA N 2 Banguntapan (Dwi Resti Melani)
16	Mie Uut (Mie Uwi Utpala) dan Stick Uwi (<i>Dioscorea spp.</i>) sebagai Kudapan Lezat	SMA N 2 Banguntapan (Kevin Alfido dan Rizky Aprillano Setya Ardiansyah)
17	GASS (<i>Grid Assist Safety Stove</i>) Penyangga Pembantu Keselamatan Kompor Gas	SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro (Siti Fatonah Wijayaningsih)
18	<i>Light Trap</i>	Sumarna
19	Alat Pengawet Bawang Merah	Handoko
20	Inovasi Irigasi Kabut yang Ekonomis Efektif, Efisien dan Ramah Lingkungan	Sumarna
21	Peralatan Dapur Untuk Memproduksi Produk Perawatan Rambut Organik	Danang Pramudiarto
22	Alat Bantu Pembuatan Lubang Lingkungan	Triyanto, S.Pd
23	Menara Energi Terbarukan	Fajar Yulianto
24	<i>Automatic Emergency Lamp</i> (OMEL)/Elektronik	Sumarwan
25	Alat Bantu Pembuatan Sambungan Jari	Triyanto, S.Pd
26	Pengamanan Kompor Otomatis	Supri Handoko, S.Pd.
27	Gokil (Gosrok Kilat)	Wahadi
28	Alat Anti Setrum & Genset	Sutaji Pragomo
29	Pengembangan Baksilus Plus	Tugiyo
30	Canting Cap Berbahan Limbah	Nurrohmad
31	Cetak Kue Sempe Tempoe Dulu	Haryono
32	Pelobang Plastik Kertas/ Manual	Seta Gunawan
33	Serut Ruji Bambu	Sukijo
34	Alat Pemipil Jagung	Surinto

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

C. POTENSI UNGGULAN DAERAH

Potensi unggulan daerah sebagai pengungkit kegiatan ekonomi adalah industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; pariwisata; serta perdagangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan

Secara umum, industri pengolahan yang terdapat di Kabupaten Bantul merupakan industri kecil menengah, sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak. Potensi IKM di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.310 IKM,

tenaga kerja sebanyak 99.008 orang, di Kabupaten Bantul memberikan kontribusi PDRB sebesar 15,21%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan IKM di Kabupaten Bantul mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Pertumbuhan industri kecil menengah dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10
Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
Tahun 2015-2017

No.	Sektor Industri	2015		2016		2017	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	Pangan	8.290	27.480	8.754	29.019	9.095	29.783
2.	Sandang dan Kulit	854	6.719	902	7.095	921	7.449
3.	Kerajinan Umum	7.143	24.772	7.543	26.159	7.912	28.623
4.	Kimia dan Bahan Bangunan	3.101	28.246	3.275	29.828	3.286	29.991
5.	Logam dan Jasa	1.035	2.900	1.093	3.062	1.096	3.162
Jumlah		20.423	90.117	21.567	95.164	22.310	99.008

Sumber: DKUKMP, 2018

2. Pertanian

Hingga tahun 2017, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Bantul. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 12,55% di bawah kontribusi sektor industri pengolahan yang sebesar 15,21%. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam bidang pertanian di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 pertumbuhan produksi tanaman pangan ditargetkan sebesar 0,101%, realisasinya sebesar 0,113%;
- b. Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura ditargetkan sebesar 1,03%, realisasinya sebesar 36,97%;
- c. Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan ditargetkan sebesar 0,150%, realisasinya sebesar 0,165%;

- d. Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, dan unggas) ditargetkan sebesar 0,60%, realisasinya sebesar 20,36%;
- e. Pertumbuhan produksi perikanan ditargetkan sebesar 1,30%, realisasinya sebesar 5,92%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor pertanian antara lain penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, rendahnya tingkat penerapan teknologi anjuran, penurunan kondisi infrastruktur pertanian, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas (Tabel 1.11).

Tabel 1.11
Populasi Ternak Tahun 2016-2017

No.	Jenis ternak	2016	2017*	Ket.
1	Sapi Potong	56.799	56.139	Ekor
2	Sapi Perah	284	80	Ekor
3	Kerbau	544	248	Ekor
4	Kuda	1.977	1.258	Ekor
5	Babi	5.329	3.544	Ekor
6	Kambing	108.199	87.195	Ekor
7	Domba	83.79	74.955	Ekor
8	Ayam buras	1.019.461	792.862	Ekor
9	Ayam ras petelur	821.587	712.307	Ekor
10	Ayam ras pedaging	1.068.221	841.103	Ekor
11	Itik	222.265	163.528	Ekor

Sumber: DPPKP, 2018

Penurunan populasi ternak tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan karena banyaknya pemotongan yang dilakukan, yang berimbas kepada naiknya produksi daging. Selain itu juga banyak ternak yang keluar dari wilayah Bantul. Siklon cempaka pada akhir November lalu juga memberikan dampak terhadap populasi ternak. Adanya banjir juga menyebabkan penyakit pada ternak, serta terbawa arus banjir.

Pada tahun 2017, unggas (ayam dan itik) masih mendominasi populasi ternak disusul sapi dan kambing. Produksi peternakan meliputi telur dan daging. Telur yang dihasilkan terdiri dari telur ayam

buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Sementara itu, daging yang dihasilkan terdiri dari daging sapi, kuda, kambing/domba, ayam, dan itik (Tabel 1.12).

Tabel 1.12
Produksi Daging, Telur, dan Susu
Tahun 2016-2017

No.	Komoditas	2016 (kg)	2017 (kg)
1	Daging	14.742.551	17.780.230
2	Telur	8.072.166	7.132.296
3	Susu	365.127	178.034

Sumber: DPPKP, 2018

Kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul juga memiliki potensi yang cukup besar. Produksi perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap, yang terdiri dari tangkap laut dan perairan umum (lihat pada Tabel 1.13).

Tabel 1.13
Produksi Perikanan Tahun 2015-2016

No.	Perikanan	2016	2017
1	Perikanan Tangkap	827,50	885,35
2	Perikanan Budidaya	11.363,72	11.546,74
	Jumlah	12.191,224	12.432,094

Sumber: DPPKP, 2018

Ket.: data sementara

Peningkatan produksi perikanan tangkap disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya bantuan kapal yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dan juga kondisi cuaca wilayah di Pantai Perairan Laut WPP 573 yang kondusif bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan serta didukung potensi ikan yang besar. Selain itu, peningkatan produksi perikanan budidaya disebabkan oleh introduksi teknologi baru yaitu budidaya ikan hemat lahan dan air (Matlair).

3. Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Potensi ekonomi daerah yang sangat mendukung dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal serta memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah ini didukung dengan keanekaragaman jenis obyek wisata alam, religius, budaya, dan buatan. Kawasan pantai selatan yang menjadi salah satu ikon utama pariwisata Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi tiga zona dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai (1) kawasan wisata alam pantai, (2) wisata budaya/religius, dan (3) wisata buatan/minat khusus. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) sesuai dengan Ripparda Kabupaten Bantul, sehingga diharapkan dapat lebih berkembang dan memberi nilai strategis terhadap perekonomian Kabupaten Bantul.

Pada tahun 2017 jumlah daya tarik wisata budaya di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh penambahan pada destinasi wisata dalam bentuk warisan budaya, cagar budaya, desa budaya, wisata alam, dan wisata pedesaan. Selain itu peningkatan jumlah wisatawan di Kabupaten Bantul juga disebabkan karena meningkatnya jasa hiburan dan rekreasi, serta jumlah wisata kuliner.

Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2017 antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi, dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata. Program-program yang dilaksanakan selain bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata

dan promosi pariwisata, juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemitraan *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata, yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu pengembangan desa-desa wisata sebagai *alternative tourism* di Kabupaten Bantul juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, di mana pada tahun 2017 jumlah desa wisata telah mencapai 38 lokasi, meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 37 lokasi. Kemunculan desa wisata ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Data tentang daya tarik wisata dapat dilihat pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14
Daya Tarik Wisata Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017

No	Daya Tarik Wisata	2016	2017	Satuan	Keterangan
1	Alam	20	22	Unit	Pantai, goa, ekosistem bakau, gumuk pasir, air terjun, hutan pinus
2	Buatan	54	59	Unit	Taman rekreasi air, kolam renang, taman wisata agro dan Desa Wisata
No.	UsahaPariwisata	2016	2017	Satuan	Keterangan
1	Hotel bintang	1	2	Unit	
2	Hotel non-bintang	94	117	Unit	
3	Restoran/rumah makan	199	225	Unit	
4	Jasa perjalanan wisata	25	67	Unit	
5	Transportasi Wisata	4	5	Unit	
6	Jasa hiburan dan rekreasi	22	57	Unit	
7	Tempat Penyelenggaraan Pertemuan, Konferensi, (MICE)	2	7	Unit	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, 2018

4. Perdagangan

Pengembangan perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2017 terdapat 25 pasar dalam kondisi baik, 33 pasar desa, 32 pasar kabupaten, dan satu pasar seni. Potensi pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar tradisional yang modern ada 24 pasar, antara lain: pasar Bantul, Imogiri, Niten, Dlingo, Jejeran, Pijenan,

Barongan, Piyungan, Pleret, Celep, Sungapan, Panasan, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 27A Tahun 2011 tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Tradisional, Pemerintah Kabupaten Bantul telah dan tetap berkomitmen untuk lebih mengedepankan aspek peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan pasar tradisional dan toko tradisional. Dalam upaya menjaga kesinambungan hal tersebut, aspek permodalan, kelembagaan dan kepemilikan lahan pasar tradisional menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Terkait dengan ekspor, pada tahun 2017 kondisi kinerja nilai ekspor adalah sebesar US\$79.200.365, mengalami kenaikan sebesar 7,09% dibanding tahun 2016. Ekspor ini dilakukan dengan tujuan negara Australia, USA, Jepang, Perancis, Hongkong, Rusia, Italia, dan Singapura. Adapun komoditi ekspor unggulannya adalah tekstil, *furniture*, dan *handycraft*.

D. PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku (Tabel 1.15) maupun atas dasar harga konstan (Tabel 1.16), pertumbuhan PDRB (Tabel 1.17), dan PDRB per kapita (Tabel 1.18). Dari Tabel 1.15 dapat dilihat bahwa empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; dan sektor konstruksi. Berdasarkan data perkembangan PDRB tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul tahun 2017 kembali melambat jika dibandingkan dengan tahun 2016. Laju pertumbuhan

PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2017 berdasarkan harga konstan sebesar 4,52% atau mengalami perlambatan dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,06%. Hal ini dikarenakan beberapa sektor utama pendukung perekonomian mengalami perlambatan pertumbuhan, tidak sebaik tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.18.

Tabel 1.15
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
(Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010)
Tahun 2016-2017

No.	Lapangan Usaha	PDRB	2016 (%)	PDRB	2017**) (%)
		(juta Rp)		(juta Rp)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.010.874	14,39	2.863.836	12,55
B	Pertambangan dan Penggalian	128.516	0,61	138.836	0,61
C	Industri Pengolahan	3.175.266	15,17	3.469.759	15,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26.436	0,13	33.145	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.044	0,08	18.872	0,08
F	Konstruksi	1.943.455	9,29	2.182.690	9,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.770.132	8,46	2.034.326	8,92
H	Transportasi dan Pergudangan	1.002.784	4,79	1.125.396	4,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.442.216	11,67	2.674.810	11,72
J	Informasi dan Komunikasi	1.519.508	7,26	1.781.704	7,81
K	Jasa Keuangan	590.450	2,82	637.789	2,80
L	Real Estat	1.376.057	6,58	1.536.249	6,73
M,N	Jasa Perusahaan	100.785	0,48	110.261	0,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.571.240	7,51	1.786.913	7,83
P	Jasa Pendidikan	1.449.028	6,92	1.532.611	6,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	387.703	1,85	431.329	1,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	413.475	1,98	457.698	2,01
	PDRB	20.924.970	100	22.816.226	100

Sumber: BPS, 2018

**) Angka sangat sementara

Catatan: Untuk melihat struktur ekonomi pembentuk PDRB (melihat Katagori yang dominan dalam pembentukan perekonomian), yang dilihat adalah kontribusi PDRB ADHB.

Tabel 1.16
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
(Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010)
Tahun 2016-2017

No.	Lapangan Usaha	PDRB	2016	PDRB	2017**)
		(juta Rp)	(%)	(juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.982.709	12,11	2.002.907	11,70
B	Pertambangan dan Penggalian	102.781	0,63	102.845	0,60
C	Industri Pengolahan	2.404.767	14,68	2.488.137	14,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.905	0,17	30.504	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.408	0,08	13.835	0,08
F	Konstruksi	1.567.472	9,57	1.629.497	9,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.401.508	8,56	1.490.851	8,71
H	Transportasi dan Pergudangan	809.961	4,95	844.089	4,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.750.671	10,69	1.862.147	10,88
J	Informasi dan Komunikasi	1.664.675	10,16	1.758.878	10,28
K	Jasa Keuangan	439.690	2,68	457.993	2,68
L	Real Estat	1.119.537	6,84	1.185.156	6,92
M,N	Jasa Perusahaan	90.911	0,56	94.797	0,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.125.301	6,87	1.193.301	6,97
P	Jasa Pendidikan	1.194.995	7,30	1.242.613	7,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	318.578	1,95	334.918	1,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	363.114	2,22	385.386	2,25
	PDRB	16.377.984	100	17.117.854	100

Sumber: BPS, 2018

***) Angka sangat sementara

Tabel 1.17
Pertumbuhan PDRB (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010) Tahun 2016-2017

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan tahun 2000	
		Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2016	20.924.970	8,28	16.377.984	5,06
2	2017**)	22.816.226	9,04	17.117.854	4,52

Sumber: BPS, 2018

***) Angka sangat sementara

Tabel 1.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2012-2017

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,73	2,66	-2,62	2,12	1,52	1,02
B	Pertambangan dan Penggalian	2,03	2,45	1,54	0,61	0,35	0,06
C	Industri Pengolahan	-2,34	6,29	4,02	2,67	5,30	3,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,53	6,11	7,34	3,08	15,10	9,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,52	0,58	3,49	2,95	2,96	3,18
F	Konstruksi	5,10	4,84	6,89	4,05	4,07	3,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,92	5,61	6,55	6,77	6,53	6,37
H	Transportasi dan Pergudangan	4,58	4,96	3,77	3,80	4,17	4,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,34	7,54	6,55	5,89	6,31	6,37
J	Informasi dan Komunikasi	10,19	6,31	7,04	5,65	8,35	5,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	11,75	9,53	8,55	5,08	4,16

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
L	Real Estate	7,71	4,52	8,78	6,87	5,82	5,86
M,N	Jasa Perusahaan	6,23	4,47	6,59	7,06	4,26	4,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,28	5,37	5,28	5,26	5,84	6,04
P	Jasa Pendidikan	6,24	5,08	7,71	7,80	3,24	3,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,62	7,52	7,31	7,51	5,20	5,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,99	5,35	6,66	8,41	6,02	6,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,33	5,46	5,04	4,97	5,06	4,52

Sumber: BPS, 2018

Tabel 1.19
Perkembangan PDRB Per Kapita
(Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010)
Tahun 2016-2017

No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan
1	2015	19.892	7,93	16.046	3,66
2	2016	21.275	6,95	16.653	3,78
3	2017 ^{**})	22.925	7,76	17.199	3,28

Sumber: BPS, 2018

***) angka sangat sementara

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2015-2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp21.275 ribu. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp22.925 ribu.

2. Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami peningkatan signifikan dari 2,26% pada tahun 2016 menjadi 3,96% pada tahun 2017. Laju inflasi tersebut diukur melalui pemantauan harga yang dilakukan di Kabupaten Bantul pada tahun 2017. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 4,20%. Akan tetapi, lebih tinggi apabila dibandingkan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,61%.

Selain itu, pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Bantul bulan Desember di mana ada perayaan Natal kembali lebih tinggi dibandingkan bulan di mana ada perayaan lebaran. Inflasi bulan Desember 2017 adalah sebesar 0,75, sedangkan inflasi bulan Juli 2017 adalah sebesar 0,40. Hal ini berbeda dengan keadaan tahun 2016, di mana pada tahun 2016 inflasi di Kabupaten Bantul mencapai kondisi yang bisa disebut *Triple Decker*. Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan kerja keras melalui pengendalian inflasi secara dini dan sistematis sehingga efektif mengendalikan inflasi baik dari aspek produksi maupun distribusi.

Pendorong inflasi tahun 2017 Kabupaten Bantul di antaranya adalah penyesuaian tarif dasar listrik, kenaikan BBM, kelangkaan bahan bakar rumah tangga, dan beberapa komoditas makanan. Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi pada kelompok ini, yaitu: beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, dan sayur-sayuran.

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan pendapatan dan investasi). Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 berada di bawah laju inflasi Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengendalikan inflasi melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPID) dan kebijakan-

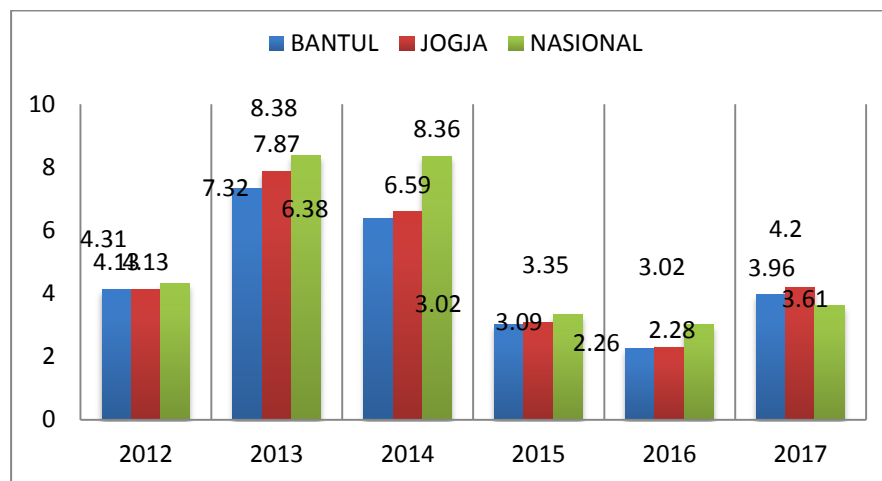
kebijakan yang diambil walaupun tidak lebih rendah dari laju inflasi nasional (Grafik 1.2).

Tabel 1.20
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2017

No.	Tahun	Laju Inflasi Kab. Bantul	Laju Inflasi Kota Yogyakarta	Laju Inflasi Nasional
1	2016	2,26	2,29	3,02
2	2017*)	3,96	4,20	3,61

Sumber: BPS, 2018

*) angka sementara



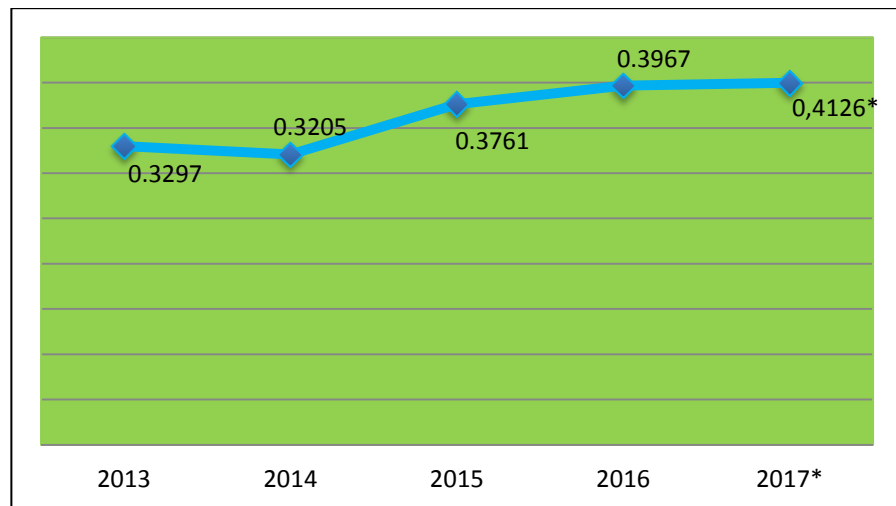
Sumber: BPS, 2018

Grafik 1.2
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2012-2017

3. Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Semakin tinggi rasio koefisien Gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada empat tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan (lihat Grafik 1.3). Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebesar 0,3967 dan pada tahun 2017 diperkirakan naik menjadi 0,4126 lebih baik dari pada capaian DIY sebesar 0,4300, namun lebih tinggi dari pada capaian nasional sebesar 0,391. Capaian ini masih dalam batas

kewajaran dan merupakan implikasi dari cepatnya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti oleh bukan mayoritas penduduk melampaui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang digeluti mayoritas penduduk. Capaian ini juga merupakan implikasi dari transformasi struktur ekonomi yang masih terus berproses dari sektor primer dan sekunder ke arah tersier.



Sumber: BPS, 2018

*) angka sementara

Grafik 1.3
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bantul
Tahun 2013-2017

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian penduduk berpendapatan menengah ke bawah, akan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun peningkatan pemerataan pendapatan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi dukungan dari masyarakat bergolongan ekonomi tinggi sangat diperlukan. Beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain:

- a. Membuka peluang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti dibukanya obyek wisata baru yang berbasis alam dan pedesaan, pengembangan sentra-sentra kerajinan, dan usaha-usaha kuliner baru;

- b. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, hal ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras;
- c. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin dengan penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro;
- d. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat;
- e. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan
- f. Membangun serta menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.